

PENULISAN SKRIPSI

**PENERAPAN *PAPUA NEW GUINEA SOLUTION POLICY*
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA
DI PULAU MANUS**



Diajukan oleh :

SYAHLA FAIZA FORTUNA MADJID

NPM : 210514166
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENERAPAN *PAPUA NEW GUINEA SOLUTION POLICY*
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI DAN PENCARI SUKA
DI PULAU MANUS & NAURU**



**Diajukan Oleh:
SYAHLA FAIZA FORTUNA MADJID**

NPM	:	210514166
Program Studi	:	Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Tentang Hubungan Internasional

**Telah Disetujui untuk Ujian Pendadaran
oleh Dosen Pembimbing pada tanggal**

17 Desember 2024
.....

Dosen Pembimbing

Dr. Heribertus Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENERAPAN *PAPUA NEW GUINEA SOLUTION POLICY*
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA
DI PULAU MANUS**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	21 Januari 2025
Tempat	:	Pendadaran 1 R. Dosen Lt. II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.
Sekretaris : Nanda Indrawati, S.H., M.H.
Anggota : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. **Enita Christiani, S.H., M.Hum**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, kasih sayang, dan karunia-Nya yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PAPUA NEW GUINEA SOLUTION POLICY DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI PULAU MANUS.”** Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang dengan komitmennya terhadap hukum internasional menjadi salah satu inspirasi bagi penulis.
2. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang selalu mendukung perkembangan akademik mahasiswa.
3. Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran mendampingi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan, setiap masukan yang sangat berharga, serta bimbingan yang menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini hingga akhir.
4. Atin Prabandari, selaku narasumber dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan bantuannya. Ilmu dan wawasan yang dibagikan sangat membantu dalam penulisan ini, serta menjadi kontribusi berharga bagi penyelesaian karya ini.
5. Ibu saya tercinta, Nicken Pratiwie, sebagai ibu tunggal penulis yang dengan penuh kasih sayang selalu memberikan dukungan tanpa henti. Setiap doa, semangat, dan pengorbanannya menjadi kekuatan terbesar yang membuat penulis terus maju dan menyelesaikan perjalanan

akademik ini. Terima kasih, Mommy Kenny, atas cinta dan dedikasi yang tak ternilai sepanjang hidup ini.

6. Sahabat-sahabat terdekat penulis, Geniva Pramuditya, Herdyan Hayon, Natasha Brigita, Nazmiah Nur Fadilla, Makhadina, Adelica Ginting, Veronika Ananda, Sarah Christina, Daniel Cahyadi, Michael Lim, dan Ellyzabeth Maharani, yang selalu memberikan dukungan yang begitu berarti. Setiap kebersamaan dan tawa yang dibagikan selalu menjadi pengingat bahwa penulis tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini.
7. Atma Jaya International Law Society, yang menjadi wadah belajar, berbagi wawasan, dan memperluas perspektif penulis dalam bidang hukum internasional. Pengalaman berharga yang penulis dapatkan dari komunitas ini menjadi bagian penting dalam pembentukan diri dan pemahaman penulis selama studi.
8. Delegasi Philip C. Jessup International Moot Court Competition 2024, kepada Christian Jonathan, Andrew Michel, Fedrick Jonatan, dan Jaclyn. Pengalaman bersama kalian adalah salah satu pencapaian yang paling berkesan dan bermakna.
9. Levi Ackerman, karakter favorit dari serial anime Attack on Titan yang penulis kagumi dan menjadi inspirasi. Keteguhannya dalam menghadapi tantangan, keberanian untuk terus bangkit, pengorbanannya demi orang lain mengajarkan penulis makna kekuatan yang sesungguhnya.
10. Terakhir, untuk teman-teman Fakultas Hukum UAJY, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, kebersamaan, dan bantuan yang telah diberikan selama ini. Meskipun tidak bisa saya sebutkan satu per satu, setiap kontribusi dan semangat yang kalian berikan sangat berarti bagi saya. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi para pembaca dan dunia ilmu hukum, khususnya dalam memahami perlindungan hak-hak pengungsi dan pencari suaka dalam konteks kebijakan imigrasi.

Dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan karya sederhana ini sebagai bentuk dedikasi dan apresiasi terhadap semua pihak yang telah berkontribusi, dan berharap semoga kebaikan yang mereka berikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Yogyakarta, 15 Desember 2024

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' followed by the name 'Faiza' and 'Madjid' in a cursive script.

Penulis

Syahla Faiza Fortuna Madjid

ABSTRACT

The human rights of refugees and asylum seekers remain a critical global issue, particularly in the context of fulfilling international obligations by states parties to the 1951 Geneva Convention and the 1967 New York Protocol. One of the fundamental principles enshrined in these instruments is the principle of non-refoulement, which prohibits the return of refugees to territories where their safety or freedom would be at risk. However, the implementation of the Papua New Guinea Solution Policy by the Australian Government is deemed to contravene this principle. This policy involves relocating refugees and asylum seekers to offshore detention centers, such as those on Manus Island, for the purpose of processing their asylum applications. This study analyzes the implementation of this policy in relation to the fulfillment of refugees' and asylum seekers' rights, including the provision of accommodation, healthcare, legal assistance, and education. However, significant challenges such as inadequate facilities, limited access to essential services, and domestic political pressures hinder its effective implementation. Furthermore, the policy is considered to fall short of international human rights standards, highlighting its inconsistency with the principle of non-refoulement. Accordingly, a comprehensive evaluation and reform of this policy are imperative to ensure the fair and humane treatment of refugees. This research adopts a normative legal methodology, utilizing a literature review of relevant national and international laws and regulations. Moreover, interviews with experts in the fields of law and migration policy were conducted to complement the analysis. The findings underscore the urgency of revising this policy to uphold the principle of non-refoulement and ensure compliance with international human rights standards.

Keywords: Papua New Guinea Solution, refugee rights, asylum seekers

ABSTRAK

Hak asasi manusia pengungsi dan pencari suaka merupakan isu global yang terus menjadi perhatian, terutama dalam konteks pemenuhan kewajiban internasional oleh negara-negara pihak pada Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Salah satu prinsip fundamental yang diatur dalam instrumen ini adalah prinsip *non-refoulement*, yang melarang pengembalian pengungsi ke wilayah di mana mereka menghadapi ancaman terhadap keselamatan atau kebebasan mereka. Namun, penerapan Papua New Guinea Solution Policy oleh Pemerintah Australia dinilai melanggar prinsip ini. Kebijakan tersebut memindahkan pengungsi dan pencari suaka ke pusat-pusat penahanan di luar negeri, seperti di Pulau Manus, untuk memproses permohonan suaka mereka. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan ini dalam memenuhi hak-hak pengungsi dan pencari suaka, seperti penyediaan akomodasi, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan pendidikan. Namun, tantangan seperti fasilitas yang tidak memadai, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dan tekanan politik domestik menjadi hambatan utama dalam pelaksanaannya. Kebijakan ini juga dinilai belum memenuhi standar hak asasi manusia internasional dan mempertegas pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement*. Oleh karena itu, evaluasi dan reformasi mendalam diperlukan untuk memastikan perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang relevan. Selain itu, wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian di bidang hukum dan kebijakan migrasi turut dilakukan untuk memperkaya analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini mendesak untuk direvisi guna memastikan penghormatan terhadap prinsip *non-refoulement* serta pemenuhan standar hak asasi manusia internasional.

Kata kunci: *Papua New Guinea Solution Policy*, hak pengungsi, pencari suaka

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Batasan Konsep.....	22
G. Metode Penelitian	24
BAB II PEMBAHASAN.....	31
A. Tinjauan Pengungsi dan Pencari Suaka secara Umum.....	31
1. Pengertian Pengungsi dan Pencari Suaka.....	31
2. Hak-hak yang dijamin oleh hukum internasional	39
B. Papua New Guinea Solution Policy.....	49
1. Definisi Papua New Guinea Solution Policy	49
2. Pembentukan Kebijakan Papua New Guinea Solution.....	50
3. Kondisi Pusat Detensi.....	58
C. Upaya Pemenuhan Hak Pengungsi.....	66
1. Upaya Pemerintah Australia untuk Mendukung Pengungsi dan Pencari Suaka.....	66
2. Hambatan Pemenuhan Hak-hak Pengungsi dan Pencari Suaka.....	71

BAB III PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
 DAFTAR PUSTAKA.	81
LAMPIRAN.....	86

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syahla Faiza Fortuna Madjid', is written on a light gray rectangular background.

Penulis

Syahla Faiza Fortuna Madjid